

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang masih banyak menghadapi permasalahan diberbagai bidang seperti ekonomi, sosial, hukum, politik dan bidang-bidang lainnya. Masalah-masalah yang sampai saat ini belum menemukan solusi dan belum terselesaikan oleh pemerintah ialah masalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah kemiskinan ini umumnya digambarkan dengan wilayah pedesaan, yang mana di pedesaan masyarakatnya sebagian besar bekerja di sektor pertanian terutama usaha tani (petani).

Salah satu permasalahan yang dihadapi petani-petani Indonesia ialah masalah permodalan selain masalah pasar, teknologi, dan organisasi tani yang masih lemah. Kementerian Pertanian mengeluarkan satu program terobosan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis di pedesaan yaitu Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Kementerian Pertanian, 2012).

Program PUAP dilaksanakan oleh petani (pemilik penggarap atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di pedesaan melalui koordinasi gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Program PUAP ini telah terlaksana sejak tahun 2008 dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat (Kementerian Pertanian, 2014).

Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015 mengacu pada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015, untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM-PUAP kepada gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani. Strategi dasar yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitas modal usaha petani kecil, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan (Kementerian Pertanian, 2015).

Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan fase lanjutan bagi gapoktan penerima dana BLM-PUAP yang dapat menjaga perguliran atau perputaran dana. LKM-A yang berhasil dikembangkan oleh gapoktan diharapkan dapat meningkatkan akumulasi modal melalui dana keswadayaan yang dikumpulkan oleh anggota melalui tabungan maupun melalui saham anggota (Kementerian Pertanian, 2014)

Penumbuhan dan pengembangan LKM-A di dalam Gapoktan PUAP merupakan salah satu langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani mikro dan buruh tani yang selama ini sulit mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal. Sebagai langkah pemberdayaan lebih lanjut dari Gapoktan PUAP menjadi LKM-A dimaksudkan untuk : 1) memberikan kepastian pelayanan serta kemudahan akses petani pada fasilitas pembiayaan, 2) prosedur yang sederhana dan cepat, 3) kedekatan lokasi pelayanan dengan tempat usaha petani, dan 4) pengelola LKM-A sangat memahami karakter petani sebagai nasabah (Kementerian Pertanian, 2014).

Dalam setiap penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan baik formal maupun informal kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau macet selalu ada. Kredit macet ini biasanya disebabkan oleh 2 unsur yaitu dari pihak nasabah dan pihak bank atau lembaganya sendiri. Dari pihak nasabah dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu : adanya unsur kesengajaan dari nasabah tidak mau membayar dan adanya unsur tidak sengaja seperti nasabah tidak mampu membayar (Kasmir, 2002).

Survei perbankan yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada Triwulan I-2015 pertumbuhan kredit baru melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Permintaan pembiayaan yang masih cukup rendah pada awal tahun dan kebijakan penyaluran kredit baru yang lebih selektif untuk menekan peningkatan resiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) menyebabkan pertumbuhan kredit baru secara triwulanan melambat. Potensi peningkatan resiko penyaluran kredit terlihat dari tingkat NPL yang cenderung meningkat pada bulan Januari dan Februari 2015 (Bank Indonesia, 2015).

Pada triwulan III 2015 rasio *Non Performing Loan* (NPL) perbankan di Sumatera Barat meningkat sedikit menjadi 3,1% dari sebelumnya sebesar 3,0%

pada triwulan II 2015, terutama terjadi pada sektor korporasi. Penyumbang utama peningkatan NPL kredit korporasi adalah ekonomi perdagangan kemudian diikuti oleh sektor ekonomi pertanian. Pada triwulan III 2015 laporan NPL sektor perdagangan tercatat meningkat menjadi 5,5% dari sebelumnya sebesar 5,0% pada triwulan II 2015, sementara NPL sektor pertanian meningkat menjadi 5,1% dari 4,7% pada triwulan sebelumnya (Bank Indonesia, 2015).

Sektor UMKM juga terus terjadi perlambatan kinerja penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada triwulan III 2015 sejalan dengan perlambatan ekonomi Sumatera Barat. Pada triwulan III 2015, rasio NPL kredit UMKM meningkat menjadi 6,7% dari sebelumnya sebesar 6,2% pada triwulan II 2015. Rasio NPL tersebut melampaui batas aman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5% sehingga perlu menjadi perhatian perbankan daerah untuk terus melakukan pengawasan secara mendalam (Bank Indonesia, 2015).

## **B. Rumusan Masalah**

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang cukup berpotensi disektor pertanian di Propinsi Sumatera Barat. Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya adalah sektor pertanian hingga mencapai 89,92%. Komposisi lahan pertanian terbanyak adalah perkebunan seluas 117.135,0 ha atau 39,56% dari total luas Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan lahan untuk sawah sebesar 9.278 ha atau 3,13% dan hutan rakyat seluas 46.433 ha atau 15,68% (BPS Dharmasraya, 2015).

Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang mendapat bantuan Dana PUAP yang tersebar di 11 kecamatan yang ada. Pada masing-masing kecamatan terdapat paling sedikit 3 gapoktan penerima PUAP yaitu kecamatan Padang Laweh dan paling banyak 10 gapoktan yang terdapat di Kecamatan Sitiung (Lampiran1) (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Dharmasraya, 2015).

Kecamatan Sitiung memiliki dua puluh satu persen (21%) dari total luas sawah di Dharmasraya. Ditengah maraknya alih fungsi lahan di Kecamatan Sitiung ini ke perkebunan namun untuk komoditi padi sawah masih banyak diusahakan oleh masyarakat. Sekitar 1.986 Ha sawah tersebar di setiap nagari di kecamatan

Sitiung, terdiri dari 1.653 Ha sawah irigasi teknis dan 333 Ha sawah tadah hujan (BPS Dharmasraya, 2015).

Kecamatan Sitiung ini dibagi menjadi empat nagari yaitu Nagari Sitiung, Siguntur, Gunung Medan, dan Sungai Duo. Dari 4 nagari ini tersebar 10 Gapoktan penerima bantuan dana PUAP. Di Nagari Siguntur dan Sitiung masing-masing terdapat 3 gapoktan. Dari dua nagari ini gapoktan dengan aset awal yang paling besar berada di Nagari Siguntur sebesar Rp 155.528.500 yang merupakan aset dari Gapoktan TDU (*Tertiary Development Unit*) Koto Tuo (Lampiran1).

Gapoktan TDU Taratak Koto Tuo berdiri tahun 2008 yang bertepatan dengan adanya Proyek Batang Hari yaitu proyek irigasi. Proyek Batang Hari ini memberi bantuan berupa fasilitas seperti tempat atau bangunan sekretariat gapoktan, gudang, dan lainnya. Gapoktan TDU Taratak Koto Tuo terdiri atas 23 kelompok tani. Jumlah anggota gapoktan yang bergabung dengan LKM-A Prima Barokah awalnya berjumlah 54 orang dan sekarang menjadi 55 orang (LKM-A Prima Barokah Kec. Sitiung, 2015).

Gapoktan TDU Taratak Koto Tuo mendapat bantuan dana PUAP pada tahun 2009 dengan memfungsikan LKM-A Prima Barokah untuk mengelola pembiayaan dan permodalan anggotanya. Saat ini nasabah LKM-A telah mencapai 100 orang. LKM-A ini memberi pinjaman kepada anggotanya yang berusaha di pertanian, perdagangan, dan peternakan (LKM-A Prima Barokah Kec. Sitiung, 2015).

Pada tahun 2009, LKM-A Prima Barokah mendapat tambahan modal dari Program PUAP sebesar Rp 100.000.000. Dana ini disalurkan kepada anggota melalui pinjaman atau kredit. Peminjaman di LKM-A ini bisa dilakukan dengan sistem negosiasi untuk waktu pengembalian dan hal-hal lain yang perlu disepakati. Untuk pinjaman usaha tani tempo pembayaran disesuaikan dengan jadwal panen. Sistem lain yang ditawarkan oleh LKM-A Prima Barokah ialah dengan sistem kerja sama. Nasabah dimodali terlebih dahulu lalu hasilnya dibagi dua.

Pada umumnya masyarakat di Nagari Siguntur ini bekerja di bidang pertanian, sehingga LKM-A ini seharusnya dapat membantu usaha tani masyarakat dalam hal permodalan. LKM-A ini telah menerapkan sistem dengan

berbagai kemudahan untuk nasabahnya, namun masalah yang selalu dihadapi oleh LKM-A Prima Barokah ialah kredit bermasalah. Nasabah yang bermasalah dalam pembayaran kreditnya ada 41 nasabah yang macet dan 8 nasabah yang menunggak dari 100 orang total nasabah tahun 2015 di LKM-A Prima Barokah (Lampiran2). Selain itu rasio aset yang dimiliki oleh LKM-A dari awal hingga sekarang termasuk rendah dibanding LKM-A Gapoktan lainnya di Nagari Siguntur.

Kredit macet atau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) sering terjadi pada lembaga keuangan baik formal maupun informal. Masalah ini bisa diakibatkan oleh nasabah ataupun oleh lembaga keuangannya sendiri. Kredit macet atau bermasalah ini bisa menyebabkan perputaran dana jadi sedikit dan banyak nasabah yang tidak akan mendapat pinjaman dana.

Nilai *Non Performing Loan* (NPL) berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia ialah sebesar 5%. Semakin kecil nilai NPL semakin bagus dan efektif kinerja suatu bank. Untuk itu perlu dilihat bagaimana perkembangan dana PUAP di LKM-A Prima Barokah dan berapa tingkat pengembalian dana serta kemampuan LKM-A menekan jumlah tunggakan agar tidak melebihi 5%. Setelah itu perlu juga diketahui faktor-faktor apa saja yang menghambat nasabah dalam pengembalian kredit yang dimilikinya.

Dari uraian di atas timbul beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimanakah perkembangan dana di LKM-A Prima Barokah ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada LKM-A Prima Barokah ini ?

Untuk menjawab pertanyaan diatas perlu dilakukan penelitian “**Studi Pengembalian Dana Pada LKM-A Prima Barokah Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya**”

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis perkembangan modal dan pembiayaan (kredit) pada LKM-A Prima Barokah.

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit pada LKM-A Prima Barokah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi program yang telah ada maupun dalam memberikan program baru terhadap masyarakat.
2. Bagi LKM-A, hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam perbaikan terhadap perkembangan LKM-A Prima Barokah.
3. Bagi mahasiswa dan atau peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat menambah bahan referensi dalam membahas lebih dalam tentang pembiayaan pertanian dan LKM-A.

